



Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

disnari
KABUPATEN MOJOKERTO

RENCANA KERJA 2026

**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmad yang telah diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen ini sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

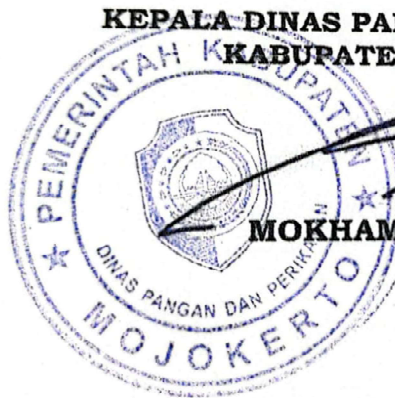
Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 merupakan hasil kompilasi Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan disinergikan dengan target kinerja dalam Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto untuk tahun berkenaan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ini, dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak yang terkait dengan pembangunan pangan dan perikanan dalam rangka mendorong kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen ini.

Mojokerto, 23 Juli 2025

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



MOKHAMAD RIDUWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penyusunan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perikanan	35
2.4. Reviu terhadap RKPD	37
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan dan Perikanan	55
3.3. Program dan Kegiatan (TC.33)	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
BAB V PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2026 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029, visi dan misi RPJPD 2025 -2045 serta arah kebijakan pembangunan transformasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto 2025 – 2045, Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah.

Melalui Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto ini dapat dirumuskan rencana-rencana kegiatan pada tahun yang akan datang. Sehingga apa yang kita harapkan dapat sejalan dengan Undang-Undang Pangan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor..... Tahun 2025 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;

14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 ;
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto;
16. Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Nomor 188/ /416-109/2025 tentang Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan dokumen Renja adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah dalam mewujudkan visi misi yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Mojokerto yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Renstra 2025-2029 yang dilaksanakan dengan :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
2. Menjadikan Rencana Kerja sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD.
3. Menjadikan Rencana Kerja sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai sasaran sehingga tidak perlu lagi direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Penyusunan dokumen Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
2. Tujuan yang dikehendaki
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas fungsinya mengelola anggaran sebesar **Rp. 8.960.529.560,00** (Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) yang dibagikan untuk 8 (delapan) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan. Kemudian pada pertengahan tahun anggaran 2024 terdapat rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 410.800.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp. 8.549.729.560,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 110.000.000,00

2. Belanja Operasi Rp. 8.360.174.716,00
3. Belanja Modal Rp. 600.354.844,00

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 202 bisa dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Tabel T-C.29 (dalam Lampiran Permendagri 89 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2024
Dinas pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2025) n- 1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja PD Tahun 2024 (n- 2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	
				Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Perikanan									
01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	85,76 (A)	77,87 (BB)	81 (A)	81,88 (A)	101	79.16 (BB)	79,16 (BB)	95,6%
	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah bernilai baik	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	100	100%	100%	100%
	01	2.01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100%
	01	2.01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100%
	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%

		2.02	0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	01	2.06	0 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
			0 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%

			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
			07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman kunjungan tamu	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	-	100%
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas, rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100	4 orang	4 orang	100%
	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%

	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dilakukan pemeliharaan/perpanjangan perizinan	30 kendaraan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	30 kendaraan	12 bulan	100%
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	4 gedung	4 gedung	4 gedung	4 gedung	100	4 gedung	4 gedung	100%
			10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	09			Urusan Pemerintah Bidang Pangan									
2	09	02		Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	100 %	-						100%
2	09	02	201	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan infrastruktur lumbung pangan	2 kelompok	-	1 kelompok	1 kelompok	100	2 kelompok	1 kelompok	100%
			01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan infrastruktur lumbung pangan	2 kelompok	-	1 kelompok	1 kelompok	100	2 kelompok	1 kelompok	100%
2	09	03		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	98,0 %	86,01 %	86,01 %	89,01 %				100%

2	09	03	2 . 0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan dan Laporan Harga Pangan	13 dokumen	12 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100	12 dokumen	13 dokumen	100%
			0 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	100%
			0 2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang diberi bantuan benih pangan lokal	3 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	100	2 kelompok	2 kelompok	100%
			0 4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pengawasan distribusi dan harga pangan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100%
			0 6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah waktu penyediaan biaya operasional TTIC Kabupaten Mojokerto	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	09	03	2 . 0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan gabah dan sarana prasarana	93 ton							100%
			0 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan gabah dan sarana prasarana	93 ton	0 ton	90 ton	0 ton	0	90 ton	0 ton	100%
			0 4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah waktu penyediaan biaya pemeliharaan cadangan pangan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	-	100%

						Pemerintah Kabupaten/Kota								
2	09	03	2 . 0 4		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan	53 desa	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	53 Desa	2 jenis	100%
			0 1		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen pph konsumsi dan identifikasi jenis tanaman pangan P2L	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	100%
			0 2		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan	53 desa	30 Kelompok	30 kelompok	30 kelompok	100%	53 Desa	30 kelompok	100%
			0 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah rapat koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	100%
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani	42 %	25%	25%	25%	100%	8%	25%	90%
2	09	04	2 . 0 1		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
			0 1		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

					Kerentanan Pangan	ketahanan dan kerentanan pangan								
2	09	04	2 . 0 2		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang dilakukan penanganan kerawanan pangan	2 desa	6 kali	6 kali	6 kali	100%	2 desa	6 kali	90%
				0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang dilakukan penanganan kerawanan pangan	2 desa	6 kali	6 kali	6 kali	100%	2 desa	6 kali	90%
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100%					50%		90%
2	09	05	2 . 0 1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengawasan keamanan pangan	10 lokasi	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	10 lokasi	1 jenis	90%
				0 1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan pelaku usaha pangan	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	90%
				0 2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan barang usaha pangan sebagai fasilitas menuju sertifikasi	2 kelompok	-	-	-	-	2 kelompok	-	90%
				0 3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan usaha yang bergerak dibidang PSAT	9 kecamatan	-	-	-	-	9 kecamatan	-	90%

			05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengambilan sampel mutu keamanan pangan	10 lokasi	-	-	-	-	10 lokasi	-	90%
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25			Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
3	25	03		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3 %					2%		90%
3	25	03	201	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	6 kelompok	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	6 kelompok	1 jenis	90%
			01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	jumlah dokumen data dan informasi	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	90%
			02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok penerima bantuan prasarana usaha perikanan tangkap	3 kelompok	-	-	-	-	3 kelompok	-	90%
			03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan tangkap	3 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	100%	3 kelompok	5 kelompok	90%

3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	10 %					10%		100%
3	25	04	2 . 0 4		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok budidaya yang menerima bantuan, pembinaan dan pemantauan	6 kelompok	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	6 kelompok	3 jenis	100%
				0 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi produksi perikanan budidaya	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	100%
				0 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi benih dan calon induk	3,5 juta ekor	3.152.400 ekor	3 juta ekor	3.152.400 ekor	105%	3 juta ekor	3.152.400 ekor	100%
				0 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima sarana pembudidayaan ikan	6 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	100%	6 kelompok	10 kelompok	100%
				0 4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha perikanan budidaya yang dilakukan pemantauan kesehatan ikan	15 unit usaha perikanan budidaya	-	-	-	-	15unit usaha perikanan budidaya	-	100%
				0 5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pelaksanaan temu teknis / temu usaha pembudidayaan ikan	2 kali	50 orang	50 orang	50 orang	100%	2 kali	50 orang	100%

3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	2 %							100%
3	25	06	2 . 0 2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah sosialisasi standar usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	6 kali	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
				0 1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah sosialisasi dan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	6 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	6 kali	2 kali	100%
3	25	06	2 . 0 3		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan skala mikro dan kecil	4 kelompok	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	4 kelompok	1 jenis	100%
				0 2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana pengolahan dan pemasar hasil perikanan	4 kelompok	18 kecamatan	18 kecamatan	18 kecamatan	100%	4 kelompok	18 kecamatan	100%

Capaian kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan maupun indikator kinerja program Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto diuraikan sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan indikator Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan dari target 100 % pada 2024 tidak ada capaian, mengingat tidak tersedianya anggaran dari DAK, disamping itu tidak ada usulan dari kelompok terkait pembangunan lumbung pangan masyarakat beserta sarana pendukungnya.
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan Kabupaten Mojokerto pada 2024 adalah 82.72 dari target 98, realisasi tercapai 85 % dari target, namun ada kenaikan capaian apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 86,01. hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat Kabupaten Mojokerto hampir memenuhi standar “Isi Piringku” yang meliputi 50 % buah dan sayur, 50 % sisanya terdiri atas karbohidrat dan protein. “Isi Piringku” juga menekankan untuk membatasi gula, garam dan lemak dalam konsumsi sehari-hari. Untuk mencapai target skor 100 pada 2026 masih perlu adanya penambahan konsumsi pada kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, dan keberagaman konsumsi sayur dan buah. Untuk mendukung program Presiden tentang ketahanan pangan, Pemerintah Daerah perlu menjaga ketersediaan pangan dengan meningkatkan produk pangan lokal, melakukan pemantauan stok pangan dan meningkatkan akses pangan kelompok rentan.
- Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan indikator Persentase Desa Rawan Pangan Yang Ditangani
Dari target 42 % desa rentan rawan pangan yang ditangani, tercapai 100 %. Hal ini dinyatakan dengan pelaksanaan pembinaan dan intervensi dari perangkat daerah terkait antara lain perbaikan sanitasi / kualitas lingkungan hidup, pemenuhan infrastruktur berupa instalasi air bersih, penyediaan tenaga kesehatan, pemenuhan gizi pada ibu hamil, disamping dengan intervensi perangkat daerah terkait, juga menggunakan keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi yaitu :
 - 1) Aspek Ketersediaan Pangan

2) Aspek Terhadap Akses Pangan

3) Aspek Pemanfaatan Pangan

Sesuai dengan data pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2024, menunjukkan bahwa desa yang masuk data prioritas 1 sudah 0%, sedangkan pada prioritas 2 adalah 3 % atau 8 desa dan prioritas 3 sebesar 3 % atau 7 desa.

 Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan indikator Persentase Jumlah Kecamatan Yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto telah membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang bertugas untuk melakukan pengawasan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian terutama beras pada 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto, diantaranya dengan menerbitkan Izin Edar PSAT- PDUK (Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil). Pada 2024 persentase jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan keamanan tercapai 100 %. Sedangkan sosialisasi terhadap pelaku usaha PSAT label putih yang telah diterbitkan izinnya menuju label hijau sebanyak 50 (limapuluh) orang pelaku usaha PSAT.

 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Target 2024 yang ditetapkan untuk peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 2 %, tetapi peningkatan persentasenya di atas 2 % yaitu hampir 3 % dari target 165.548 Kg tercapai 170.514 Kg atau tercapai 103%.

 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Sama halnya dengan persentase produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya pun tercapai targetnya. Target 2024 adalah 1.620.865 Kg tercapai 1.961.247 Kg atau sebesar 121 % dari target, sedangkan persentase kenaikan sebesar adalah 21 %

 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator Persentase Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan

Pengolahan hasil perikanan merupakan salah satu agroindustri yang memanfaatkan hasil perikanan sebagai bahan baku untuk menghasilkan suatu produk yang diinginkan. Target 2024 adalah 1.012.406 kg dengan realisasi 3.551.682 Kg capaiannya sebesar 350 % . Terdapat kenaikan yang sangat signifikan pada indikator tersebut, dari target kenaikan 2 % tercapai 25 %

Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Realisasi anggaran Dinas Pangan dan Perikanan TA 2024 adalah 91,88 % dari pagu anggaran Rp. 8.960.529.560,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah), kemudian ada himbauan dari Kepala Daerah untuk melakukan rasionalisasi anggaran di setiap Perangkat Daerah. Dari pagu anggaran tersebut, ada rasionalisasi pada beberapa sub kegiatan dengan total sebesar Rp. 410.800.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 8.549.729.560,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

IP ASN Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari target nilai 70 terealisasi 84,07. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas atau kualitas sikap ASN serta derajat keahlian dan pengetahuan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai standar yang ditentukan, dengan mengikuti bimtek yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun pihak lain.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah pelaksana otonomi daerah di bidang pangan dan perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mojokerto melalui Sekretaris Daerah.

Analisis dalam pencapaian kinerja dilaksanakan menggunakan telaahan yang mendasar tentang berbagai faktor kunci keberhasilan maupun kegagalan. Hal ini penting dilakukan untuk menyikapi kinerja organisasi di masa yang akan datang, sehingga keberhasilan yang diraih dapat ditingkatkan serta kegagalan yang dialami mendapatkan jalan keluar yang sesuai. Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupten Mojokerto dengan

menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Keberhasilan kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto telah ditetapkan pada periode sebelumnya dengan mengacu pada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto. Keberhasilan kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada pencapaian indikator yang telah ditetapkan sebagaimana pada tabel 2.2 (TC-3.0) :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan (tabel TC-30)
Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2024

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)		Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras / jagung sesuai kebutuhan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	216,1 %	170 %	170 %		
2	Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi			2100 kkal/kap/hr	2100 kkal/kap/hr	2100 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr	2400 kkal/kap/hr	2968 kkal/lap/hr	4446 kkal/kap/hr	4446 kkal/kap/hr		
3	Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein			57 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	82,06 gr/kap/hr	63,25 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr		
4	Capaian Skor Pola Pangn Harapan (PPH) Konsumsi Yang Sesuai Kebutuhan Gizi			-	86,1 %	87 %	89,1 %	89,1 %	89,01	89,35 %	90 %		
5	Persentase Keamanan Pangan Yang			-	83,3 %	93 %	93 %	93 %	93 %	94 %	94,10 %		

	Memenuhi Standard dan Persyaratan Kesehatan												
6	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya Sesuai Potensi			1.339.558 Kg	1.473.514 Kg	1.620.865 Kg	1.782.952 Kg	1.961.247 Kg	1.575.600 kg	1.750.904 Kg	1.790.655 Kg		
7	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap Sesuai Potensi			159.120 Kg	162.302 Kg	165.548 Kg	170.514 Kg	175.629 Kg	112.765 kg	170.514 Kg	172.219 kg		

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
8	Tingkat Produksi		Jumlah Total Produksi	973.093	992.555	1.012.406	1.032.654	1.053.037	992.589 kg	3.551.682	3.622.716		

	Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Potensi		Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/Kota	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg		Kg	kg		
9	Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Mojokerto			-	45,00 kg/kapita/thn	45,17 kg/kapita/th	45,17 kg/kapita/th	47.00 kg/kapita/th	48.17 kg/kapita/th	49,34 kg/kapita/th	49,40 kg/kapita/th		
10.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	83,26 (A)	83,76 (A)	79,16 (B)	81 (A)	81 (A)	77,87 (B)	81,80 (A)	82 (A)		
11	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			-	100 %	100 %	91 %	91 %	88,42 %	91,88 %	91,90 %		
12	Indeks Profesionalitas ASN				70	70	70	75	87,90	84,07	85		

13	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan				2	2	2	2	2	1	2		
----	---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Sebagaimana pada tabel di atas dijelaskan bahwa ada perubahan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan 2021-2026 mengingat ada beberapa indikator yang harus dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan terdapat penyesuaian indikator maupun output sub kegiatan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terdapat indikator kinerja yang digunakan. Di samping itu target kinerja pada tabel TC-30 Renstra Dinas Pangan dan Perikanan perlu ditambahkan untuk mencukupi indikator pada SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) indikator nomor 2 yaitu "Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan". Selain untuk memenuhi indikator SDGs (TPB), juga sebagai parameter penilaian Kabupaten Sehat yaitu "Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan."

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dalam melaksanakan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2024. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel di atas (TC-30). Adapun pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut : apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Pengukuran mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau Muda
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	Oranye
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah Tua

Berikut disampaikan capaian rencana kerja tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 %	170 %	170	Sangat baik
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	2968 Kkal/Kap/hari	4446 Kkal/Kap/hari	149	Sangat baik
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	64,26 Gram/Kap/Hari	63.25 Gram/Kap/hari	98.4	Tinggi
		Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Gizi Penduduk	90	89,35	99.3	Tinggi
		Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan	93,5 %	94 %	100	Tinggi
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	165.548 Kg	170.514 Kg	103	Sangat Baik
		Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.620.865 Kg	1.750.904 Kg	108	Sangat Baik
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	1.012.406 Kg	3.551.682 Kg	351	Sangat Baik
		Angka Konsumsi Ikan	48,35 Kg/Kapita/Tahun	49,34 Kg/Kapita/Th	102	Sangat baik
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	81,80 (A)	100	Baik
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91 %	91,88 %	100	Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	70	84.07	120	Sangat Baik
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi Dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	2	1	50	Kurang

Dari tabel 2.4 di atas bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja pada tahun anggaran 2024 rata-rata sangat baik dan bisa dijelaskan sebagai berikut :

a) Sasaran “Meningkatnya ketersediaan Pangan” terdapat 4 (empat) indicator kinerja yaitu :

1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama :

Komoditas	Produksi Gabah (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan Konsumsi Riil (Ton)	Surplus / Minus (Ton)
Padi	319.995,12	151.634,78	88.767,05	62.867,73

Sesuai dengan data bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan bahwa produksi gabah pada 2024 adalah 319.995,12 ton dengan memperhitungkan yang tercecer, pakan dan bibit maka tersisa 300.035 ton, dengan rendemen 64,02 %, maka ditemukan 192.083 ton beras. Sedangkan dihitung dengan yang tercecer, pakan dan stok maka dihasilkan perhitungan beras sebanyak 151.635,78 ton. Sedangkan konsumsi beras masyarakat Jawa Timur adalah 77,36 kg. Maka apabila jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto 1.147.435 jiwa maka dibutuhkan 88.767,05 ton beras, sehingga surplus sebesar 62.867,73 ton atau sebesar 170 % ketersediaan pangan utama berupa beras.

2. Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi :

Indikator berikutnya merupakan data yang diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, yang disusun antara lain untuk bahan evaluasi untuk pengadaan, penggunaan dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi sesuai rekomendasi kecukupan gizi dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG XI) tahun 2018 serta untuk penyusunan Pola Pangan Harapan tingkat ketersediaan. Adapun Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi Kabupaten Mojokerto pada 2024 tercapai 4446 Kkal/Kapita/Hari di atas rekomendasi WNPG XI yaitu 2400 Kkal/kapita/Hari

3. Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein :

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Mojokerto tahun 2024 menunjukkan bahwa total ketersediaan protein 63,25 gram/kapita/hari, kontribusi zat gizi tertinggi

bersumber dari kelompok makanan gula, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Mojokerto 90 % berpenghasilan dari perkebunan tebu

Terkait dengan ketersediaan energi dan protein serta PPH ketersediaan perlu melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Produksi kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak serta kacang-kacangan walaupun sudah melebihi anjuran skor PPH perlu terus ditingkatkan karena tidak hanya memenuhi ketersediaan ideal, tetapi semua kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Mojokerto bis terpenuhi serta bisa sebagai penggerak roda perekonomian.
- b. Ketersediaan kelompok buah biji berminyak, gula, sayuran dan buah masih di bawah skor PPH ideal sangat perlu mendapatkan perhatian, mengingat sebagian kebutuhan kedelai masih dipenuhi dari impor untuk bahan baku tempe / tahu
- c. Peningkatan produk kelompok sayur dan buah dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia, seperti lahan yang marginal, ruang terbuka dan pekarangan sesuai potensi sumber daya lokal.

4. Persentase Keamanan Pangan Yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Kesehatan

Penghitungan persentase keamanan pangan dilaksanakan dengan melakukan sampling di 5 (lima) pasar wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu di pasar Dinoyo, , Pugeran, Bagusan, Kedungmaling dan Mojosari. Komoditi yang diambil sebagai sampling adalah bawang merah, kubis, wortel, tomat dan jeruk. Komoditi sebagai uji sampling tersebut selanjutnya dikirim ke laboratorium dengan parameter *logam berat pb*, *dan residu pestisida (orgnofosfat)*. Uji laboratorium pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dilakukan bertujuan memastikan bahwa PSAT yang beredar di pasar bebas dari cemaran serta untuk menghitung persentase keamanan pangan di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini bisa juga disebut pengawasan *post market* . Sesuai dengan hasil uji laboratorium terhadap sampling PSAT yang ada di pasar bahwa persentase keamanan pangan di Kabupaten Mojokerto pada 2024

adalah 94 %. Persentase masih di atas angka persentase pengawasan keamanan pangan nasional tahun 2023 yaitu 92,66 %. Perlu disampaikan bahwa pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan / atau menjadi bahan baku pengolahan pangan. Termasuk juga pangan yang sudah mengalami perlakuan minimal berupa pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan.

Sedangkan standar keamanan pangan meliputi : harus bersih / mencuci tangan sebelum mengolah makanan, menisahkan penyimpanan pangan mentah dan matang untuk mencegah kontaminasi silang, masak dengan seksama dan matang, simpan pangan pada suhu aman agar terhindar dari *danger zone* serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.

b). Sasaran “Meningkatnya Produksi Perikanan” terdapat 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Tingkat Produksi Perikanan Budidaya :

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Mojokerto pada 2024 dari target 1.620.865 Kg pada 2024 realisasi sebesar 1.750.904 Kg atau realisasi mencapai 108 % , sedangkan capaian produksi perikanan budidaya Jawa Timur sebesar 1.403.076,38 ton, serta realisasi produksi perikanan budidaya nasional adalah 4,88 juta ton.

2. Tingkat Produksi Perikanan Tangkap :

Produksi perikanan tangkap adalah hasil tangkapan yang dilakukan di perairan laut dan perairan umum baik yang didaratkan oleh pelabuhan maupun non pelabuhan. Data produksi perikanan tangkap Kabupaten Mojokerto pada 2024, dari target 165.548 kg tercapai 170.514 Kg ada peningkatan jika dibandingkan dengan perolehan capaian pada tahun 2023 yang hanya tercapai 69,47 % dari target 162.302 kg sedangkan realisasi hanya sebesar 112.765 kg yang disebabkan terutama karena cuaca ekstrim, sehingga menyebabkan mengeringnya dan menurunnya ketinggian air pada sungai dan perairan umum. Sedangkan capaian produksi perikanan tangkap Jawa Timur pada 2024 adalah 621.437,86 ton yang mana Jawa Timur merupakan daerah dengan volume komoditas

tertinggi perikanan secara nasional. Adapun perolehan produksi perikanan tangkap nasional adalah sebesar 5,36 juta ton.

Disamping itu juga dilaksanakan penebaran benih ikan wader di beberapa sungai di wilayah Kabupaten Mojokerto oleh Bupati Mojokerto pada pertengahan 2024 oleh Bupati Mojokerto, di Sungai Mrasih Desa Kemiri Kecamatan Pacet, sungai Klurek Desa Begaganlimo Kecamatan Gondang,

3. Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan :

Industri pengolahan hasil perikanan merupakan kegiatan yang mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi lebih tinggi sebagai outputnya. Produksi pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Mojokerto masih didominasi produksi krupuk ikan di Kecamatan Kutorejo merupakan sentra industrinya. Sedangkan produk-produk olahan lain berupa abon ikan, keripik kulit ikan, *nugget* ikan dan sentra kuliner ikan wader di Trowulan merupakan pengungkit tingkat produksi pengolahan perikanan. Pada 2024 produksi pengolahan terdapat peningkatan signifikan, mengingat adanya beberapa komoditas olahan ikan yang dimasukkan pada data pengolahan, yang mana target 2023 adalah 992.555 kg terealisasi 992.589 kg sedangkan pada 2024 dari target 1.012.406 kg tercapai sebesar 3.551.682 kg.

4. Angka Konsumsi Ikan

Sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi di Kabupaten Mojokerto disamping melakukan kampanye GEMARIKAN, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto juga menyelenggarakan Lomba Cipta Menu Masak Ikan. Berdasarkan Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur bahwa ada peningkatan angka konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar 48,17 kg per kapita per tahun sedangkan pada 2024 mengalami peningkatan sebesar 49,34 kg per kapita per tahun. Perlu disampaikan bahwa angka konsumsi ikan Jawa Timur pada 2023 adalah 51,45 kg per kapita per tahun, capaian 2024 belum dirilis oleh BPS Provinsi Jawa Timur. Sedangkan angka konsumsi ikan nasional pada 2023 mencapai 57,48 kg per kapita per tahun, target 2024 untuk angka konsumsi ikan nasional sebesar 63,05 kg per kapita per tahun.

c). Sasaran “Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” terdapat 3 (tiga) indikator kinerja :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada 2024 nilai SAKIP Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah 81,80, ada kenaikan nilai dibandingkan tahun 2023 yaitu 77,87. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pada Dinas Pangan dan Perikanan juga menunjukkan kenaikan.

2. Persentase Realisasi Anggaran

Pada 2024 realisasi anggaran Dinas Pangan dan Perikanan terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 88,42 %, sedangkan sebesar 91,88 % pada 2024.

3. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

Sebagai alat ukur kualitas ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan, target yang dipasang Dinas Pangan dan Perikanan terkait IP ASN pada 2024 adalah 70 tercapai 84,07 terdapat penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya yaitu 87,90 pada 2023.

d) Sasaran “Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Merupakan Nilai Tambah”

1. Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi Dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan, inovasi pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto terdapat 1 inovasi yang sudah diterapkan yaitu aplikasi SIMHARPA yang berfungsi untuk input data harga pangan harian hasil dari pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pada beberapa pasar di wilayah Kabupaten untuk selanjutnya data dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri setiap minggu secara *realtime*.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pertambahan penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan terhadap pangan, energi, dan air. Pemenuhan kebutuhan akan permintaan-permintaan tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga ketahanan terhadap pangan, energi, dan air merupakan keniscayaan. Sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia, ketahanan pangan menjadi prasyarat mutlak.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Pemenuhan kebutuhan dan menjaga ketahanan pangan masyarakat menjadi tugas penting Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Eksistensi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun regional. Fungsi dari Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sangatlah strategis dengan permasalahan dan isu-isu penting yang berkembang, antara lain :

1. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain :
 - (a) Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani dan nelayan.
 - (b) Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah:
 - Infrastruktur distribusi.
 - Sarana dan prasarana pasca panen.
 - Pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah.
 - Sistem informasi pasar.
 - Keterbatasan lembaga pemasaran daerah.
 - Hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi.
 - Kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan.
 - Adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.
 - (c) Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena :
 - Masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen,
 - Harga pangan dunia semakin tidak menentu akibat adanya perang Rusia dan Ukraina, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan

masyarakat.

2. Cadangan pangan.

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :

- (a) Sistem cadangan pangan daerah selain beras (daging, telur, sayuran, bawang merah, bawang putih) untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam ataupun non alam minimal 3 (tiga) bulan
- (b) Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya
- (c) Sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan, Poktan, TTI ataupun lembaga usaha lainnya

3. Rendahnya pasokan utama pangan pokok sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan

Bahan pangan pokok dan strategis harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu serta pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar tetap lancar sampai ke seluruh wilayah konsumen sepanjang waktu. Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja sistem distribusi di Kabupaten Mojokerto. Harga yang terlalu berfluktuasi dapat merugikan petani produsen, pengolah, pedagang hingga konsumen, berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Kebijakan yang terkait dengan distribusi pangan dimaksudkan untuk memperlancar pasokan dan memfasilitasi keterjangkauan masyarakat, sekaligus memproteksi sistem ekonomi dalam daerah dari persaingan yang kurang menguntungkan khususnya tekanan

perdagangan global. Isu terkini terkait kelangkaan minyak goreng, hal ini menandakan bahwa distribusi stok pangan yang ada pada distributor berjalan lambat. Demikian juga dengan naiknya harga kedelai di pasaran, berkurangnya pengembangan kedelai lokal karena menghadapi beberapa tantangan berupa alih fungsi lahan di daerah potensial dan persaingan penggunaan lahan dengan komoditas pangan strategis lainnya. Kedua permasalahan tersebut di atas membuat Satuan Tugas Pangan Kabupaten Mojokerto segera mengambil tindakan dengan lebih intensif melakukan sidak pada gudang-gudang distributor yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto.

4. Rendahnya angka produksi perikanan dan hanya cukup memenuhi konsumsi ikan domestik (552,0 ton sesuai data statistik perikanan Jawa Timur, 2020)

Ada beberapa faktor penyebab rendahnya produksi ikan di Kabupaten Mojokerto, antara lain terbatasnya area penangkapan ikan yang terbatas pada sungai dan waduk, mengingat Kabupaten Mojokerto wilayahnya lebih banyak daratan daripada perairan, selain itu pemanfaatan sungai yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah. Di samping itu peralatan yang digunakan masih sederhana serta harga ikan konsumsi masih dipengaruhi oleh tengkulak. Selain hal tersebut, harga pakan yang relatif tinggi juga sangat besar pengaruhnya terutama terhadap budidaya perikanan

5. Kurangnya akses individu (keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu) dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) untuk mencapai ketahanan pangan

Saat ini pertanyaan yang timbul adalah dapatkah Kabupaten Mojokerto memproduksi pangan yang cukup pada tingkat harga yang pantas dan terjangkau bagi kelompok miskin serta tidak merusak lingkungan ? Selanjutnya untuk mengetahui pentingnya keamanan bahan pangan untuk kesehatan masyarakat, melalui berbagai upaya dan memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk dapat memilih dan memilih produk pangan yang berkualitas dan baik untuk kesehatan pada masyarakat serta memenuhi B2SA. Perubahan preferensi dan gaya hidup konsumen dalam memilih pangan menjadi tantangan tersendiri bagi

seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Mojokerto, di sepanjang rantai pangan untuk dapat bersama-sama menjaga keamanan pangan. Oleh karena itu, sinergisme dan keterpaduan kajian risiko keamanan pangan sangat penting untuk meningkatkan kontribusi kajian risiko sebagai landasan ilmiah dalam program keamanan pangan, antara lain dengan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*) dan atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan, Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar. Sejak pertengahan 2021, ketika Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) mendelegasikan wewenang ke pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pangan dan Perikanan bergerak cepat dengan membentuk OKKPD Kabupaten Mojokerto selanjutnya melakukan sampling ke beberapa pasar di wilayah Kabupaten Mojokerto terkait keamanan pangan, selanjutnya mengirimkan hasil uji ke laboratorium di Surabaya. Apabila hasilnya aman untuk dikonsumsi, maka bahan lokal tersebut diterbitkan izin edarnya, dengan sasaran utama para pelaku usaha penggilingan padi, pengusaha sayur, buah organik dan pedagang sayur/buah di pasar

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah :
 - (a) Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan. Oleh karena itu ada SDG's *Acceleration Frame Work* (MAF). Metodologi MAF adalah

kerangka metodologi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan *stakeholders* berupa pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan *bottleneck* dalam upaya mencapai target SDG's dengan kategori *off-track* sekaligus mempercepat solusi untuk memecahkan *bottleneck* tersebut.

- (b) Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah:
- belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya
 - belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta
 - belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal
 - rendahnya citra pangan lokal
 - belum optimalnya Pengembangan program perbaikan gizi yang *cost effective*, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A.

7. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :

- (a) Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap rasa, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
- (b) Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.
- (c) Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.

2.4 Reviu Terhadap RKPD

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memasuki tahun kedua pembangunan dalam rentang waktu pelaksanaan RPJMD tahun 2025–2029, dengan visi yang ingin diwujudkan adalah “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Dalam memantapkan ketahanan pangan Kabupaten Mojokerto rancangan program, kegiatan, sub kegiatan yang diusulkan atau sudah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dengan mengacu pada Rencana Strategis 2025-2029 yang telah ditetapkan dan merupakan salah satu rancangan dalam memantapkan ketahanan pangan di daerah, baik yang prioritas maupun non prioritas. Untuk lebih jelasnya rancangan program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran T-C.31.

Pada tahun anggaran 2026 pagu indikatif pada RKPD Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebesar Rp. 8.368.043.773,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), sedangkan sebesar Rp. 5.372.049.000 (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Sembilan Rupiah) untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Tabel 2.5

(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Mojokerto

Dinas Pangan dan Perikanan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Dispari	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,26 (A)	6.077.985	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Dispari	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	6.104.985	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dispari	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	20 %	1.000.000.000	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dispari	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	20 %	250.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
3	Program Peningkatan Diversifikasi	Dispari	Skor Pola Pangan Harapan	97%	870.000.000	Program Peningkatan Diversifikasi	Dispari	Skor Pola Pangan Harapan	97%	870.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan

	dan Ketahanan Pangan Masyarakat		(PPH Ketersediaan)			dan Ketahanan Pangan Masyarakat		(PPH Ketersediaan)			
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dispari	Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani	8 %	100,000,000	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dispari	Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani	8 %	100.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dispari	Persentase Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	50%	130.000.000	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dispari	Persentase Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	50%	130.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dispari	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2 %	190.000.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dispari	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2 %	190.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispari	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10 %	985.015.000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispari	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10 %	985.015.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
8.	Program Pengolahan dan	Dispari	Persentase Peningkatan Produksi	2 %	370.000.000	Program Pengolahan dan	Dispari	Persentase Peningkatan Produksi	2 %	370.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan

	Pemasaran Hasil Perikanan		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			Pemasaran Hasil Perikanan		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
--	---------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum perencanaan tahunan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, untuk menyepakati kegiatan pada tahun anggaran yang berjalan sesuai tingkatannya. Musrenbang bertujuan untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berjenjang, mulai dari Musrenbang Desa, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten. Mekanisme ini ditempuh untuk menyelaraskan program dan kegiatan hasil usulan masyarakat dengan program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah pengampu usulan tersebut. Berdasarkan serangkaian kegiatan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah tersebut, usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang diampu oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
TA. 2026 Kabupaten Mojokerto
 (Tabel T-C.32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pokdakan Jaya Mandiri Desa Sumbergirang Kec. Puri	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Benih lele 20.000 ekor Pakan lele 2.220 Kg	Pokir PKS
		Pokdakan Mina Kebonagung Ds. Kebonagung Kec. Puri		Pakan lele 2.220 Kg Benih lele 20.000 ekor	Pokir PKS
		Pokdakan Rukun Sejahtera Desa Plososari Kec. Puri		Pakan lele 2.220 Kg Benih lele 20.000 ekor	Pokir PKS
		Pokdakan K-Puas Desa Brangkal Kec. Sooko		Pakan lele 330 Kg Benih lele 10.000 ekor	Pokir PDIP

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dalam merumuskan kebijakan akan memadukan antara prinsip *top down policy* dan *bottom up planning* yang mana proses ini sesuai dengan apa yang ingin dicapai Pemerintah Pusat dengan kegiatan yang ada di daerah sehingga tujuan yang dicapai sesuai dengan yang ditentukan.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) akan mengacu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Perikanan sebagai penjabaran dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 berkedudukan sebagai kerangka dasar manajemen pembangunan sektor pangan dan perikanan di Kabupaten Mojokerto

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, secara vertikal pada tingkat kementerian ada 3 (tiga) kementerian yang terkait yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Pangan Nasional. Namun Badan Pangan Nasional baru dibentuk pada 2021 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2021 yang merupakan lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Mengingat Badan Pangan Nasional masih baru berdiri, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto secara vertical masih terkait pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pada tingkat provinsi, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang terkait yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Tentunya tujuan dan sasaran strategis dari Renstra masing-masing kementerian dan perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur terkait penyusunan perencanaan perangkat daerah di Kabupaten/Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan nasional dan provinsi.

1. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian menjalankan berbagai program untuk meningkatkan sector pertanian Indonesia dengan beberapa program prioritas yang meliputi

1. Swasembada Pangan
2. Pangan Bergizi
3. Biofuel
4. Hilirisasi

2. Badan Pangan Nasional

Visi Badan Pangan Nasional yang tertuang dalam Renstra 2022 – 2024 yakni : **“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.”**

Tatakelola sistem pangan nasional diharapkan dapat mengakomodasi sistem pangan yang telah ada di masyarakat, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumberdaya alam untuk mendukung pemenuhan pangan bagi negara maupun perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Adapun misi Badan Pangan Nasional yaitu :

- a. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan ;
- b. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen
- c. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi
- d. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar
- e. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang
- f. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya

Tujuan Badan Pangan Nasional 2022-2024 sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan

- b. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat

Tujuan Badan Pangan Nasional tersebut untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Dalam rangka mencapai prioritas nasional, dilaksanakan 2 program prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi. Sasaran yang akan dicapai pada 2 program prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan.

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam penjabaran misi pembangunan kelautan dan perikanan, tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi: Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan : meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.

Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, dengan tujuan:

1. Optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
2. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
3. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
5. optimalnya pengelolaan ruang laut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan

Dalam menjalankan Rencana Kerja pada kegiatan tahun 2026, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto memerlukan tujuan dan sasaran program dan kegiatan agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan sasaran dengan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	87,88
			Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	4450 Kkal/Kap/Hr
			Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	66 Gram/Kap/Hr
			Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang Sesuai Kebutuhan Gizi Penduduk	90,3
			Persyaratan Keamanan Pangan Yang memenuhi Standar dan persyaratan Kesehatan	94,20 %
2.		Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.826.468 Kg
			Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	173.941 Kg

			Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	3.695.170 Kg
			Angka Konsumsi Ikan	49,50 Kg/Kap/Hari
3.		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5 (A)
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92 %
			Indeks Profesionalitas ASN	85,2
		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	2

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 antara lain adalah :

- a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah ;
- b. Pencapaian SDG's

Tabel 3.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur			
MISI 3 : Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan daya saing ekonomi	1. Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masyarakat	1. Pemanfaatan lumbung pangan masyarakat
			2. Optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM)
			3. Penguatan Satgas Ketahanan Pangan
			4. Meningkatkan sistem pengendalian dan penanganan desa rawan pangan
			5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)
			6. Optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
		2. Peningkatan Keamanan Pangan	1. Pengawasan Keamanan Pangan
			2. Peningkatan Sertifikasi dan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
			3. Digitalisasi penerbitan sertifikasi izin edar PSAT
			4. Peningkatan kinerja pelayanan OKKPD Kab. Mojokerto
	2. Meningkatnya produksi perikanan	1. Peningkatan produksi perikanan	1. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pembinaan usaha perikanan budidaya dan tangkap untuk meningkatkan minat masyarakat
			2. Digitalisasi transaksi dan peningkatan pelayanan serta ketersediaan benih ikan di UPTD Budidaya Air Tawar
			3. Penguatan Permodalan Usaha berupa sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan budidaya dan tangkap

		2. Peningkatan konsumsi dan keanekaragaman pangan berbasis olahan ikan	1. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pembinaan usaha pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan minat masyarakat
			2. Penguatan Permodalan Usaha berupa sarana dan prasarana pendukung usaha pengolahan hasil perikanan
			3. Sosialisasi gemar makan ikan
			4. Optimalisasi program kerja FORIKAN

Terkait dengan pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's), Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto turut aktif dalam pencapaian tujuan nomor 2 (dua) yaitu “Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan”. Targetnya adalah pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2026 mencapai target yang disepakati secara internasional. Indikator Pencapaian SDG's Dinas Pangan dan Perikanan adalah :

1. Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH), pada 2024 tercapai 89,35 dari target 90 relatif masih jauh di bawah skor PPH Jawa Timur yaitu 93,8 sedangkan capaian nasional adalah 94,1 lebih tinggi dari target RPJMN yaitu 94 ;
2. Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Mojokerto pada 2024 tercapai sebesar 49,34 kg / kapita / tahun dari target tahun 2024 sebesar 48,35 kg/kapita/tahun, di bawah angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Timur sebesar 51,45 kg / kapita / tahun juga masih di bawah angka konsumsi ikan nasional yaitu 57,91 kg/kapita/tahun ;

Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 terdapat 8 (delapan) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan, dengan pagu indikatif pada RKPD sebesar Rp. 8.368.043.773,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Juta Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah),

Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 dan prakiraan maju Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto
(Tabel T-C.33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan	Rencana Tahun 2027	
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1						2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	09	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	MOJO KERTO	81	6.318.049.000			81	6.318.049.000
				2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	MOJO KERTO	90%	20.000.000			90%	20.000.000
					0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MOJO KERTO	2 Dokumen	10.000.000	DAU		2 Dokumen	10.000.000
					0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	MOJO KERTO	2 Laporan	10.000.000	DAU		2 Laporan	10.000.000

[illegible]

					0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	MOJO KERTO	5 Paket	97.200.000	DAU	5 Paket	97.200.000
					0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	MOJO KERTO	2 Paket	12.000.000	DAU	2 Paket	12.000.000
					0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	MOJO KERTO	6 Paket	30.000.000	DAU	6 Paket	30.000.000
					0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	MOJO KERTO	33 Paket	65.000.000	DAU	33 Paket	65.000.000
					0008		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	MOJO KERTO	2 Laporan	8.000.000	DAU	2 Laporan	8.000.000
					0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MOJO KERTO	12 Laporan	57.000.000	DAU	12 Laporan	57.000.000
			2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	MOJO KERTO	90,50%	282.000.000		90,50 %	282.000.000

									Daerah Sesuai Kebutuhan							
					0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	MOJO KERTO	12 Laporan	90.000.000	DAU		12 Laporan	90.000.000
					0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	MOJO KERTO	12 Laporan	192.000.000	DAU		12 Laporan	192.000.000
			2	09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	MOJO KERTO	90,50%	286.800.000			90,50 %	286.800.000
					0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	MOJO KERTO	30 Unit	65.000.000	PAD		30 Unit	65.000.000
					0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	MOJO KERTO	1 Unit	194.800.000	DAU		1 Unit	194.800.000

									Dipelihara/Direhabilitasi							
					0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	MOJO KERTO	40 Unit	27.000.000	PAD		40 Unit	27.000.000
2	09	02						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Desa yang diberi bantuan pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya	MOJO KERTO	-	-			-	-
			2	01				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya	MOJO KERTO	-	-			-	-
					0003			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	MOJO KERTO	-	-	-		-	-
2	09	03						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH	MOJO KERTO	83	1.154.994.773			83	1.154.994.773

						KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan)(%)							
			2	01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koefisien Variasi harga pangan (CV %)	MOJO KERTO	35%	235.000.000			35%	235.000.000
					0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	MOJO KERTO	50 Keluarga	50.000.000	DBH		50 Keluarga	50.000.000
					0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	MOJO KERTO	1 Laporan	120.000.000	DBH		1 Laporan	120.000.000
					0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	MOJO KERTO	12 Laporan	50.000.000	PTAD		12 Laporan	50.000.000

					0016		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	MOJO KERTO	1 Dokumen	15.000.000	DAU, PAD		1 Dokumen	15.000.000
			2	02			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah	MOJO KERTO	50 Ton	400.000.000			50 Ton	400.000.000
					0003		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	MOJO KERTO	20,4 Ton	150.000.000	DBH		20,4 Ton	150.000.000
					0005		Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	MOJO KERTO	15 Ton	40.000.000	DBH		15 Ton	40.000.000
					0008		Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	MOJO KERTO	3 Kelompok	210.000.000	DBH		3 Kelompok	210.000.000
			2	04			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)(%)	MOJO KERTO	90%	519.994.773			90%	519.994.773
					0001		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	MOJO KERTO	1 Dokumen	40.000.000	PAD		1 Dokumen	40.000.000

					0002		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	MOJO KERTO	1 Dokumen	250.000.000	DBH, SILPA 100jt		1 Dokumen	250.000.000
					0005		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	MOJO KERTO	1 Dokumen	229.994.773	PAD, SILPA 100jt		1 Dokumen	229.994.773
2	09	04					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa rentan rawan pangan	MOJO KERTO	4,30%	20.000.000			4,30%	20.000.000
				2	01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	MOJO KERTO	1 Dokumen	20.000.000			1 Dokumen	20.000.000
					0001		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	MOJO KERTO	Dokumen	20.000.000	DBH		Dokumen	20.000.000

2	09	05					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	MOJO KERTO	94,20%	60.000.000			94,20 %	60.000.000
			2	01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan pada unit usaha pangan segar	MOJO KERTO	10 Unit Usaha	60.000.000			10 Unit Usaha	60.000.000
					0006		Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	MOJO KERTO	1 Dokumen	20.000.000	PAD		1 Dokumen	20.000.000
					0007		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	MOJO KERTO	1 Dokumen	40.000.000	PAD		1 Dokumen	40.000.000
3	25	03					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	MOJO KERTO	1%	50.000.000			1%	50.000.000

			2	01			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan yang menerima bantuan atau pembinaan dan pemantauan	MOJO KERTO	30 Orang	50.000.000			30 Orang	50.000.000
					0004		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	MOJO KERTO	5 Unit	50.000.000	PTAD		5 Unit	50.000.000
3	25	04					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	MOJO KERTO	2%	510.000.000			2%	510.000.000
			2	04			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang menerima bantuan atau pembinaan dan pemantauan	MOJO KERTO	50 Orang	510.000.000			50 Orang	510.000.000
					0002		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan	MOJO KERTO	1 Unit	300.000.000	PAD		1 Unit	300.000.000

							dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
					0008		Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	MOJO KERTO	1 Dokumen	20.000.000	PTAD		1 Dokumen	20.000.000
					0009		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	MOJO KERTO	4 Unit	160.000.000	DBH		4 Unit	160.000.000
					0010		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	MOJO KERTO	15 Unit	30.000.000	PTAD		15 Unit	30.000.000
3	25	06					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan	MOJO KERTO	2%	255.000.000			2%	255.000.000

								pemasaran hasil perikanan								
			2	03				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan	MOJO KERTO	150 Unit Usaha	255.000.000			150 Unit Usaha	255.000.000
					0001			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	MOJO KERTO	1.086.000 Ton	170.000.000	PTAD		1.086.000 Ton	170.000.000
					0002			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	MOJO KERTO	150 Pelaku Usaha	85.000.000	PTAD		150 Pelaku Usaha	85.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja pendanaan pada Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 disusun berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto serta Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029.

Pelaksanaan kegiatan pada Renja 2026 harus efektif dan efisien agar tercipta keterpaduan dan sinergi antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten dan satuan kerja dengan masyarakat. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Rencana Kerja dan pendanaan memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai program / kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Pada 2026 jumlah kebutuhan dana / pagu indikatif yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan program / kegiatan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah sebesar Rp. 8.368.043.773 yang bersumber dari APBD Kabupaten Mojokerto.

4.1

Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026
Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran RKPD	Rincian Penggunnaan Belanja	Target	Sumber Dana	Lokasi
2	09	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6.318.049.000		81		
			2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	20.000.000		90%		
					0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	DAU	Dispari
						Rincian Belanja :							
					0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	Penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	DAU	Dispari
						Rincian Belanja :							

			2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	5.372.049.000		91%		
					0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.372.049.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	DAU	Dispari
							Rincian Belanja :						
			2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	88.000.000		85%		
					0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48.000.000	Pengadaan seragam ASN		PAD	
					0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	Bimbingan Teknis Karyawan karyawan Dispari	55 Orang	PAD	Dispari
							Rincian Belanja :						
			2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	269.200.000		90,50%		
					0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	97.200.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	DAU	Dispari

					0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12.000.000	penyediaan bahan logistik kantor dalam bentuk pengadaan makanan, minuman, snack	2 Paket	DAU	Dispari
					0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30.000.000	Pemenuhan atas kebutuhan beberapa barang cetak dan fotocopy	6 Paket	DAU	Dispari
					0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	65.000.000	Pengadaan bahan alat tulis kantor, kertas / cover dan materai	33 Paket	DAU	Dispari
					0008		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8.000.000	Penyediaan makanan dan minuman untuk	2 Laporan	DAU	Dispari

										kunjungan tamu			
					0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.000.000	belanja perjalanan dinas pegawai untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	12 Laporan	DAU	Dispari
			2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	282.000.000		90,50%		
					0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	90.000.000	Belanja penyediaan listrik dan internet	12 Laporan	DAU	Dispari
					0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	192.000.000	Penyediaan gaji Non ASN	12 Laporan	DAU	Dispari

								Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
			2	09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	286.800.000		90,50%		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 Unit	PAD	Dispari
					0002									
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	194.800.000	Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor, jasa kebersihan dan keamanan	1 Unit	DAU	Dispari
					0009									

					0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27.000.000	Pemeliharaan AC, Printer, Komputer Laptop dan Sarana Lainnya	40 Unit	PAD	Dispari
2	09	02					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Desa yang diberi bantuan pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya	-		-		
			2	01			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya	-		-		
					0003		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		-	-	-
							Rincian Belanja :						
2	09	03					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)(%)	1.154.994.773		83		
			2	01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam	Koefisien Variasi harga pangan (CV %)	235.000.000		35%		

							rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						
					0007		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50.000.000	sosialisasi dan pelatihan terkait ketahanan pangan keluarga	50 Keluarga	DBH	Desa rentan pangan
							Rincian Belanja :						
					0009		Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	120.000.000	Pelatihan dan Pemberian bantuan sarana untuk pengolahan pangan	1 Laporan	DBH	Kabupaten Mojokerto
							Rincian Belanja :						
					0008		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	50.000.000	1. Stabilisasi Pasokan dan Harga ditingkat Produsen dan Konsumen lewat giat GPM, 2. pantau Satgas	12 Laporan	PTAD	Beberapa lokasi di Kabupaten Mojokerto

										Ketahanan Pangan			
							Rincian Belanja :						
					0016		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	15.000.000	Penyusunan dokumen PPH dan NBM	1 Dokumen	DAU, PAD	Kabupaten Mojokerto
							Rincian Belanja :						
			2	02			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah	400.000.000		50 Ton		
					0003		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150.000.000	Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	20,4 Ton	DBH	Kabupaten Mojokerto
							Rincian Belanja :						
					0005		Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	40.000.000	Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	15 Ton	DBH	Beberapa lokasi yang membutuhkan bantuan pangan
							Rincian Belanja :						

					0008		Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	210.000.000	Pengadaan Isi lumbung penerima bantuan DAK	3 Kelompok	DBH	3 Lumbung di Kabupaten Mojokerto
							Rincian Belanja :						
			2	04			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)(%)	519.994.773		90%		
					0001		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	40.000.000	Sosialisasi dan Harmonisasi angka PPH Konsumsi	1 Dokumen	PAD	Kabupaten Mojokerto
							Rincian Belanja :						
					0002		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250.000.000	Sosialisai dan Pemberdayaan KWT	1 Dokumen	DBH, SILPA 100jt	Kabupaten Mojokerto
							Rincian Belanja :						

					0005		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	229.994.773	Promosi dan Lomba Cipta Menu B2SA dan Lomba Produk Olahan Unggulan TK.Kabupaten, , Promosi Produk Unggulan dan Lomba Cipta Menu B2sa TK.Provinsi	1 Dokumen	PAD, SILPA 100jt	Kabupaten Mojokerto dan Provinsi
							Rincian Belanja :						
2	09	04					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa rentan rawan pangan	20.000.000		4,30%		
			2	01			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	20.000.000		1 Dokumen		
					0001		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	20.000.000	Penyusunan Peta FSVA Kabupaten Mojokerto	Dokumen	DBH	Kabupaten Mojokerto

2	09	05					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	60.000.000		94,20%		
			2	01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan pada unit usaha pangan segar	60.000.000		10 Unit Usaha		
					0006		Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	20.000.000	Sosialisasi izin edar PSAT PDUK & fasilitasi pengujian mutu produk	1 Dokumen	PAD	Kabupaten Mojokerto
							Rincian Belanja :						
					0007		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	40.000.000	Pengadaan rapid test, Pengambilan sampel dan pengujian ke Laboratorium, sosialisasi sanitasi higiene, Pengawasan	1 Dokumen	PAD	Kabupaten Mojokerto
							Rincian Belanja :						

3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	50.000.000		1%		
			2	01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan yang menerima bantuan atau pembinaan dan pemantauan	50.000.000		30 Orang		
					0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50.000.000	1.Sosialisasi penangkapan ikan. 2.Bantuan penebaran benih ikan Perairan Umum	5 Unit	PTAD	1.UPTD Perikanan budidaya air tawar 2.(Kelompok Usaha Bersama, KUB) (1.Dawar blandong, 2.Ngoro,B angsal)
						Rincian Belanja :						
3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	510.000.000		2%		
			2	04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang menerima bantuan atau pembinaan dan pemantauan	510.000.000		50 Orang		

					0002		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	1.Operasio nal UPTD 2.Rehab kolam ikan	1 Unit	PAD	UPTD Perikanan budidaya air tawar dan Pembudid aya ikan
							Rincian Belanja :						
					0008		Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	1.Sosialisasi kesehatan ikan dan lingkungan. 2.Pemanta uan/Monit oring kesehatan ikan dan lingkungan, 3.Bantuan alat/bahan kesehatan ikan	1 Dokumen	PTAD	1.UPTD Perikanan budidaya air tawar. 2.Kelomp ok pembudid aya ikan di Kab.Mojo kerto
							Rincian Belanja :						
					0009		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	1.Sosialisasi budidaya ikan kolam terpal 2.Bantuan sarana usaha budidaya ikan (Pakan,	4 Unit	DBH	1.UPTD Perikanan budidaya air tawar.2.K elompok pembudid aya ikan di Kab.Mojo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					0001			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	(1) data produksi hasil olahan, (2) Kegiatan Forikan & Raker Forikan, (3) Lomba Cipta Menu/LCM perikanan dan (4) pemberian makanan tambahan pada daerah stunting	1.086.000 Ton	PTAD	Kabupaten Mojokerto dan desa rawan stunting

					0002			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	85.000.000	(1) Pelatihan diversifikasi olahan produk perikanan, (2) Pelatihan pemasaran bagi UMKM, (3) Pelatihan pengemasan hasil produk olahan perikanan	150 Pelaku Usaha	PTAD	Kabupaten Mojokerto
								Rincian Belanja :						
								TOTAL ANGGARAN		8.368.043.773				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat kebijakan dan Program / Kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) organisasi perangkat daerah. Disamping itu juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil kinerja perangkat daerah di tahun sebelumnya. Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 disusun berdasarkan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan tahun 2025-2029.

Penyusunan Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Pangan dan Perikanan sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang telah disusun sehingga bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan PDRB sektor perikanan serta ketahanan pangan di Kabupaten Mojokerto.

